



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON PAILIT UNTUK
KEPENTINGAN UMUM, DALAM PERSPEKTIF UUK-PKPU
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR
23/ PDT.SUS / PAILIT /2013 / PN.NIAGA / JKT.PST)**

TESIS

RATNA NURUL AFIAH

1210922013

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN 2014**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON PAILIT UNTUK
KEPENTINGAN UMUM, DALAM PERSPEKTIF UUK-PKPU
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR
23/ PDT.SUS / PAILIT /2013 / PN.NIAGA / JKT.PST)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

RATNA NURUL AFIAH

1210922013

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

TAHUN 2014



PANITIA UJIAN SIDANG TESIS PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA 2013/2014

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum dipublikasikan, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama : RATNA NURUL AFIAH
NRP : 1210922013
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Jakarta, 7 Juli 2014

Yang bersangkutan



Ratna Nurul Afiah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UPN "VETERAN" Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RATNA NURUL AFAH

NRP : 1210922013

Program Studi : Hukum Bisnis

Fakultas : Program Pascasarjana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPN "Veteran" Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul : FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM, DALAM PERSPEKTIF UUK-PKPU (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 23/PDT.SUS/ PAILIT/ 2013/ PN.NIAGA/ JKT. PST)

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini, UPN "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Juli 2014

Yang menvatakan

Ratna Nurul Afiah

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Program
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta

Jakarta, 7 Juli 2014

Pembimbing I




Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU

Pembimbing II



Dr. Erni Agustina, SH., SpN

Ketua Program



Dr. Erni Agustina, SH. SpN



**UPN "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : RATNA NURUL AFIAH
NRP : 1210922013
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Fungsi Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Umum, Dalam Perspektif UUK-PKPU (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/ PN.Niaga/ JKT. PST)

Telah berhasil dipertahankan dalam pengujian dihadapan Dewan Penguji

Program Pascasarjana UPN "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 7 Juli 2013

Dewan Penguji :


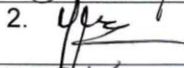

1. Dr.Erni Agustina SH., Sp.N ()
2. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU ()
3. Dr. St Laksanto Utomo, SH., M.Hum ()

REVISI HASIL SEMINAR SIDANG KOMPREHENSIF/TESIS

Nama : Ratna Nurul Afiah
 NRP : 1210922013
 Program Studi : Hukum Bisnis

- I. JUDUL TESIS : FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM, DALAM PERSPEKTIF UUK-PKPU (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 23/PDT.SUS/ PAILIT/2013/ PN.NIAGA/ JKT. PST)
- II. SUBSTANSI : -
- III. TEKNIK PENULISAN : -

TIM PENGUJI :

No.	Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Erni Agustina SH., Sp.N	Penguji Lembaga	1. 
2.	Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU	Penguji Ahli	2. 
3.	Laksanto Utomo, SH., M.Hum	Penguji Tesis	3. 

Jakarta, 17 Juli 2014

Telah direvisi

Penguji Lembaga : 

Penguji Ahli : 

Penguji Tesis : 

ACC
 Kaprogdi : 

Tanggal :

Mengetahui

A.n. DIREKTUR

Ketua Program


 Dr. Erni Agustina SH., Sp.N

ABSTRAK

Judul : “Fungsi Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk
Kepentingan Umum, Dalam Perspektif UUK-PKPU”
Nama : Ratna Nurul Afiah
NRP : 1210922013
Kata Kunci : Kejaksaan, Kepailitan, kepentingan umum

Menurut Undang-undang Kejaksaan, institusi Kejaksaan mempunyai tugas, wewenang dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha Negara, diantaranya Kejaksaan dapat mengajukan kepailitan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana fungsi Kejaksaan sebagai pemohon pailit untuk kepentingan umum, dan kendala apa yang ditemui dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Dengan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum, apabila memenuhi syarat-syarat, yakni debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta juga memenuhi syarat kepentingan umum, antara lain 1) debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan; 2) debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; 3) debitur tidak bertitikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Fungsi kejaksaan sebagai pemohon pailit untuk kepentingan umum ini sebagai instrumen yang dapat memudahkan Kejaksaan melakukan percepatan eksekusi perkara pidana yang putusannya terhadap barang bukti, mengandung “membagi secara adil dan seimbang kepada para investor yang jumlahnya banyak”. Untuk tercapainya penegakan hukum yang berintikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka substansi UUK-PKPU perlu disempurnakan yakni adanya peraturan mengenai tugas dan kewenangan kejaksaan setelah permohonan pailitnya dikabulkan oleh pengadilan, karena status barang bukti dalam perkara pidana yang diajukan permohonan pailit dimaksud secara otomatis berubah menjadi harta pailit. bagaimana peralihan harta pailit dari kejaksaan kepada kurator sebagai petugas yang harus mengurus dan membereskan harta pailit tersebut. Peraturan putusan serta-merta dalam kepailitan juga perlu ditinjau kembali, karena dapat merugikan institusi Kejaksaan, manakala dalam upaya kasasi yang diajukan oleh termohon pailit dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

ABSTRACTION

Title : "Function of Attorney's Office As Bankrupt Applicant For the sake of Public, In Perspective of UUK-PKPU"
Name : Ratna Nurul Afiah
NRP : 1210922013
Keyword : attorney's office, bankruptcy, public of interest.

According to Code Prosecutor, Attorney's Office institution has duty, authority and function in civil area and arranges State business, between of Attorney's Office can filled for bankruptcy the sake of public as arranged in UUK-PKPU. Problem of this thesis is how function of Attorney's Office as bankrupt applicant for the sake of public, and constraint of what encountered and effort which is done to overcome the constraint. With research of *yuridis normatif* note that Attorney's Office can apply for bankrupt for the sake of public, if fulfilling conditions, namely debtor which has two or more creditor and do not pay totally, at least one debt which have yield to maturity and collectable, and also up to standard of public interest, for example 1) debtor embezzling is part of properties possession; 2) debtor has the debt which comes from accumulation of fund from public of wide; 3) debtor do not have faith either or not co-operative in solve the problem of receivable and liability which have yield to maturity. Attorney's office function as bankrupt applicant for the sake of public as an instrument that can fasilitate the acceleration attorney of criminal execution which its decision to proof goods, contain "to divide well-balanced and fairly to investors which the many numbers". To be reached him(her straightening of law cored certainty, justice and efficacy of law, then substance UUK-PKPU need to be enhanced namely existence of regulation about duty and attorney's office authority of after application of its(the bankrupt granted by court, because of proof goods status in criminal which is submitted application of bankrupt intended automatically turns into bankrupt possession. how switchover of bankrupt possession from attorney's office to curator as officer which must take care and sets right the bankrupt possession. Regulation of decision instantaneously in bankruptcy also needs term returns, because can be detrimental Attorney's Office institution, when in effort of cassation which is submitted from the applicant bankrupt granted by supreme court.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul "Fungsi Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Umum, Dalam Perspektif UUK-PKPU (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NOMOR 23/Pdt.SUS/PAILIT/2013 /PN.NIAGA/JKT.PST) .

Berhasilnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan serta bantuan moril dan dorongan semangat dari semua pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih,

جَزَاكُمُ الْجَزَاءَ أَحْسَنَ اللَّهُ وَجَزَاكُمُ كَثِيرًا خَيْرًا اللَّهُ

(Semoga Allah SWT akan membalas kalian dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT akan membalas kalian dengan balasan yang terbaik),

kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Sally,SH., MH., APU selaku Pembimbing I, dan
3. Ibu Dr. Erni Agustina, SH, SpN. selaku Ketua Program Studi Program Pascasarjana Magister Hukum UPN "Veteran" Jakarta, dan Pembimbing II, serta
4. Bapak Dr. Imam Haryanto, SH., MH selaku Penguji Proposal, dan Bapak Dr. St. Laksanto Utomo, S.H. M.H. selaku Penguji Tesis, yang telah

banyak memberikan bimbingan, koreksi dan masukan kepada Penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Segenap dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jakarta yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan selama Penulis mengikuti perkuliahan, serta dukungan sepenuhnya.
6. Para Staff Tata Usaha Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jakarta, Bapak Mukti dkk, yang telah memberikan pelayanan prima kepada Penulis dan rekan-rekan lainnya selama mengikuti perkuliahan dan dalam penyusunan Tesis ini.
7. Ibunda tercinta, Hajjah Siti Qomala H. Abdul Affu, Suami tercinta H.Wirzal Yanuar,S.H, dan anak-anakku Tamara Hanum Krisnawirdani, SH, Dwitia Kemala Noviani, Sheila Prilia Andini, Nurmala Afifah Wirzafanie, dan juga untuk Betha Giri Yudhana, serta seluruh keluarga besar Penulis atas segenap doa, dan dukungannya serta kasih sayang yang tidak pernah putus kepada Penulis.
8. Bapak Narendra Jatna,SH,LL.M (Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok), Ibu Sekti Anggraini, SH.,MH (Kasi Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Cibinong), Ibu Wiwin Erni Muryanti,SH, dan Bapak Alfian SH., MH (Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cibadak) selaku Tim Jaksa Pengacara Negara yang telah mewakili Kejaksaan Negeri Cibadak dalam pengajuan pailit terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT.QSAR) dan H.M. Ramli Araby, SE, (perkara Nomor 23/Pdt.Sus/ Pailit/2013/

PN.Niaga/ Jkt. Pst), dimana semangat dan kesuksesan mereka telah memberikan inspirasi dan semangat pula kepada Penulis.

9. Teman-teman seperjuanganku, Angkatan VI Tahun 2012, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jakarta, terutama Kelas Konsentrasi Hukum Bisnis , yaitu Bapak Anhari Sulthoni (Ketua Kelas), Bapak Darus Amin, Abang Gatot, Abang Fajar, serta Abror, Lutfi, Ival, Dery, Huda, dan si cantik berdua, Shofi dan Yudith, atas perjuangan, kerjasama, kekompakan kita selama ini.

10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun selalu Penulis harapkan dan terima dengan tangan terbuka guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Permohonan maaf yang setulus-tulusnya pula apabila selama dalam penyelesaian tesis ini Penulis banyak melakukan kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi almamater dan Penulis.

Amin Ya Robbal’alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 17 Juli 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
LEMBAR REVISI SIDANG TESIS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. KerangkaTeori dan Kerangka Konseptual	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	32

BAB II TINJAUAN UMUM

A.	Pengertian Kepailitan	35
B.	Sejarah Kepailitan	41
C.	Syarat Bagi Kejaksanaan Untuk Mengajukan Permohonan Pailitan	45
D.	Pengadilan Yang Berwenang Menangani Kepailitan	49
E.	Akibat Hukum Pernyataan Pailit	52
F.	Pengurusan Harta Pailit'	69
G.	Upaya Hukum Atas Putusan Pernyataan Pailit	
	1. Pengajuan Kasasi	76
	2. Pengajuan Peninjauan Kembali	78

BAB III PERKEMBANGAN KEJAKSAAN DALAM BIDANG BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA SERTA PENANGANAN PERMOHONAN KEPAILITAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A.	Perkembangan Fungsi Kejaksanaan RI Dalam Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	82
	1. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda.....	82
	2. Setelah Indonesia Merdeka	85
	a. Masa Berlakunya UU Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Kejaksanaan RI	87
	b. UU Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksanaan RI.....	89
	c. UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksanaan RI	90

1) Tugas, Wewenang dan Fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ...	91
2) Tugas, Wewenang dan Fungsi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi	93
3) Tugas, Wewenang dan Fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tipe A	95
4) Tugas, Wewenang dan Fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tipe B	97
B. Jaksa Pengacara Negara Sebagai Pejabat Fungsional Yang Mewakili Kejaksaan RI Dalam Penanganan Perkara Kepailitan Untuk Kepentingan Umum	100
BAB IV ANALISA FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
A. Analisa Fungsi Kejaksaan Dalam Pengajuan Kepailitan Untuk Kepentingan Umum Oleh Kejaksaan Negeri Cibadak Terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) , dan H. M Ramli Araby SE SelakuPribadi Dan Selaku Presiden Direktur PT. QSAR	110
1. Tahap Persiapan Pengajuan Kepailitan Oleh Kejaksaan Negeri Cibadak Terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT.QSAR) dan H.M. Ramli Araby, SE Selaku Pribadi dan Selaku Presiden Direktur PT. QSAR.....	111
a. Kejaksaan Negeri Cibadak menerbitkan Surat Perintah Untuk Membuat Telaahan Permohonan Kepailitan	111
b. Kejaksaan Negeri Cibadak menerima Hasil Telaahan Jaksa Pengacara Negara	113
c. Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak Menerbitkan Surat Kuasa Khusus Kepada Jaksa Pengacara Negara Untuk Mengajukan Permohonan Kepailitan	118

d.	Kejaksaan Negeri Cibadak Selaku Pemohon Pailit Menunjuk Kurator	120
e.	Ketelitian Negeri Cibadak menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Yang Berwenang Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya /PT. QSAR.....	123
f.	Surat Permohonan Pailit Oleh Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum Kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	124
g.	Kelengkapan Dokumen Surat Perintah/Surat Tugas Untuk Menghadiri Sidang Dalam Pengajuan Kepailitan	142
2.	Tahap Pelaksanaan (Proses Sidang Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Negeri Cibadak Terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT.QSAR) dan H.M. Ramli Araby, SE Selaku Pribadi dan Selaku Presiden Direktur PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT.QSAR)	143
a.	Pendaftaran Permohonan Kepailitan.....	143
b.	Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Memberikan Tanda Terima	145
c.	Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cibadak Menerima Panggilan Sidang	146
d.	Pelaksanaan Persidangan perkara Kepailitan Nomor : 23/Pdt. Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt. Pst	146
e.	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/ Jkt.Pst	162

1) Amar putusan.....	162
2) Dasar pertimbangan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	163
3. Tahap setelah putusan pernyataan pailit .	191
B. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Untuk menanggulangi hambatan	193
1. Kendala Yang dihadapi.....	194
2. Upaya Untuk menanggulangi hambatan	198
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	200
B. Saran-saran.....	202
- DAFTAR PUSTAKA	204